

The Influence of Local Institutional Roles, Transparency, and Community Participation on the Accountability of Village Fund Management in Enoneten Village, South Central Timor Regency, East Nusa Tenggara Province

Pengaruh Peran Kelembagaan Lokal, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Enoneten Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Agusta Amanda Wulandari¹, Wilsna Rupilu²

Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Kupang

¹amandaagusta@gmail.com, ²wilsnarupilu1986@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the influence of the role of local institutions, transparency, and community participation on the accountability of Village Fund management in Enoneten Village, South Amanuban District, Timor Tengah Selatan Regency. The research problems are as follows: (1) Does the role of local institutions influence the accountability of Village Fund management? (2) Does transparency influence the accountability of Village Fund management? (3) Does community participation influence the accountability of Village Fund management? and (4) Do the role of local institutions, transparency, and community participation simultaneously influence the accountability of Village Fund management? This research uses a quantitative associative method with a descriptive approach. Data were collected through questionnaires distributed to 50 respondents consisting of village officials, BPD members, community leaders, and Village Fund beneficiaries, and analyzed using multiple linear regression with SPSS version 25. The results show that the role of local institutions, transparency, and community participation have a positive and significant influence on the accountability of Village Fund management, both partially and simultaneously. The coefficient of determination (R^2) of 0.727 indicates that 72.7% of the variation in accountability can be explained by these three variables, while the remaining 27.3% is influenced by other factors outside this study. This proves that the better the village institutions, the openness of information, and the involvement of the community, the higher the level of accountability in Village Fund management. Thus, the accountability of Village Fund management is not only determined by administrative and reporting systems, but also by the synergy between optimally functioning village institutions, information transparency, and active community participation in every stage of Village Fund management. The village government is expected to strengthen institutional capacity, increase public openness, and encourage real community participation to create effective, transparent, and sustainable Village Fund governance.

Keywords: *Local Institutions, Transparency, Community Participation, Accountability, Village Fund.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh peran kelembagaan lokal, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Enoneten, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah peran kelembagaan lokal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa? (2) Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa? (3) Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa? dan (4) Apakah peran kelembagaan lokal, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh

<https://journal.yrpioku.com/index.php/ceej>

e-ISSN:2715-9752, p-ISSN:2715-9868

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license

terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa? Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif asosiatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui kuesioner kepada 50 responden yang terdiri dari perangkat desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, dan masyarakat penerima manfaat Dana Desa, serta dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kelembagaan lokal, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, baik secara parsial maupun simultan. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,727 menunjukkan bahwa 72,7% variasi akuntabilitas dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan 27,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik kelembagaan desa, keterbukaan informasi, dan keterlibatan masyarakat, maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh sistem administrasi dan pelaporan, tetapi juga oleh sinergi antara lembaga desa yang berfungsi optimal, transparansi informasi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa. Pemerintah desa diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan keterbukaan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat secara nyata untuk mewujudkan tata kelola Dana Desa yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Peran Kelembagaan Lokal, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dana Desa.

1. Pendahuluan

Dana desa merupakan dana untuk desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dari pemerintah pusat guna membiayai pembangunan desa maupun penyelenggaraan pemerintahan demi kemajuan desa. Pemerintah pusat telah mengatur tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sesuai isi peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 16 Tahun 2018 prioritas penggunaan dana desa yaitu diperuntukan bagi desa untuk mendanai pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, maupun pelaksanaan pemerintahan. Ini berarti bahwa dana desa memiliki manfaat yang besar bagi pembangunan desa, dengan memperbaiki pembangunan jalan kegiatan ekonomi desa akan meningkat karena infrastruktur fisik telah berkembang. Desa pun diibaratkan sebagai komunitas terkecil yang tergabung kepada komunitas yang lebih besar untuk tempat tinggal atau sekedar untuk kegiatan ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada sektor agraris. Desa merupakan daerah yang tersebar luas dan terikat kepada perundang-undangan dan dipimpin oleh pemerintah desa yang dipilih oleh rakyat yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat setempat. Organisasi publik atau pemerintah terbagi menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa, pemerintah desa merupakan pengelola keuangan desa dan program pembangunan, (Mita Ayu Kristini, Dkk 2020: 181,183).

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam mengelola sumber daya kepada Pemerintah Pusat dalam bentuk laporan dalam periode yang telah ditentukan sebelumnya sehingga dapat terlihat apakah tercapai atau tidaknya tujuan organisasi. Akuntabilitas sangat diperlukan untuk dijalankan oleh Pemerintah Desa terutama ketika mengelola keuangan desa, dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dana akan benar-benar digunakan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. (Mita Ayu Kristini, Dkk 2020: 182). Fenomena yang terjadi di Desa Enoneten dapat dilihat dari kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2023–2025 yang setiap tahunnya selalu disusun dalam posisi seimbang antara pendapatan dan belanja. Secara administratif hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah desa dalam menjaga stabilitas anggaran,

namun di sisi lain menimbulkan pertanyaan kritis mengenai apakah kondisi tersebut benar-benar mencerminkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas bukan hanya sebatas keseimbangan angka dalam laporan, melainkan juga menyangkut sejauh mana pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran secara terbuka, jujur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, variabel akuntabilitas menjadi sangat penting untuk diteliti, khususnya dalam kaitannya dengan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Kelembagaan lokal/desa merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa tidak dapat dilakukan tanpa adanya kelembagaan desa dan partisipasi masyarakat. Kelembagaan desa berperan sebagai tempat partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan transparan serta mewujudkan akses masyarakat agar lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. (Fikri Assiddiq, 2022:3). Peran kelembagaan lokal di desa sangat menentukan keberhasilan pengelolaan dana desa. Kelembagaan desa yang terdiri dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga masyarakat, dan lembaga adat, yang berfungsi sebagai penggerak, pengawas, sekaligus fasilitator pembangunan.

Secara lokal, di Desa Enoneten yang berada di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), persoalan kelembagaan dan partisipasi juga masih menjadi tantangan utama. Kurangnya sumber daya manusia serta pengawasan yang cukup membuat pengelolaan dana desa tidak berjalan dengan baik dan lancar serta menjadi kelemahan pemerintah desa dalam mengelola anggaran dana tersebut. Pengelolaan keuangan desa yang baik merupakan aspek penting dalam menyukseskan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Terlebih lagi setiap tahun dana yang dialokasikan pada setiap desa mengalami kenaikan, (Nurul Arifin, Dkk 2024:50). Faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas adalah komitmen organisasi pemerintah desa. Agar kinerja semakin optimal diperlukan adanya pemerintah desa memiliki komitmen yang kuat. Komitmen organisasi merupakan sikap sejauh mana seorang individu mengenal dan terikat kepada organisasinya. Berikut Anggaran pendapatan dan belanja Desa Enoneten tahun 2023-2025.

Tabel 1. Anggaran Bendapatan dan Belanja

Tahun	Uraian	Anggaran	Jumlah Belanja	Lebih/kurang
2023	Pendapatan	1.202.498.908,00	1.202.498.908,00	0,00
2024	Pendapatan	1.224.231.448,00	1.224.231.448,00	0,00
2025	Pendapatan	1.277.667.239,00	1.277.667.239,00	0,00

Sumber: Desa Enoneten 2025

Berdasarkan data pada tabel 1.1 terlihat bahwa tahun 2023 Desa Enoneten memperoleh pendapatan sebesar Rp1.202.498.908,00 dengan jumlah belanja yang sama yaitu Rp1.202.498.908,00 sehingga posisi anggaran berada dalam kondisi seimbang tanpa surplus maupun defisit. Pada tahun 2024, pendapatan desa meningkat menjadi Rp1.224.231.448,00 dan belanja juga sama dengan jumlah pendapatan tersebut, yakni Rp1.224.231.448,00, sehingga kembali menunjukkan kondisi berimbang. Selanjutnya pada tahun 2025, pendapatan desa kembali meningkat menjadi Rp1.277.667.239,00 dengan jumlah belanja sebesar Rp1.277.667.239,00, yang juga berada dalam kondisi nol lebih/kurang atau seimbang. Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa selama periode 2023–2025, Desa

Enoneten selalu menyusun anggaran dalam kondisi berimbang di mana pendapatan dan belanja memiliki jumlah yang sama setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi pemerintah desa dalam menyusun APBDes agar tidak terjadi defisit. Namun, kondisi ini juga membuka ruang pertanyaan mengenai efektivitas realisasi anggaran, sebab keseimbangan di atas kertas belum tentu mencerminkan akuntabilitas dalam pengelolaan maupun partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Dengan demikian, data tersebut menjadi dasar penting untuk mengkaji sejauh mana prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi telah benar-benar dijalankan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Enoneten.

Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan efisien, efektif, dan adil. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang penggunaan dana desa, sehingga dapat memonitor dan menilai kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan publik. Sementara itu, akuntabilitas mengharuskan pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka dalam pengelolaan dana desa, serta menjelaskan penggunaan dana tersebut kepada masyarakat. Ketika transparansi dan akuntabilitas diimplementasikan dengan baik dalam pengelolaan keuangan desa, beberapa manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat Pertama, meningkatnya transparansi dapat membantu masyarakat untuk memahami alokasi dana desa dan mengidentifikasi prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kedua, akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah desa bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan atau korupsi dalam pengelolaan dana desa, (Adhy Susano dan Meida Rachmawati, 2024: 51-52). Transparansi merupakan salah satu pilar penting dalam tata kelola pemerintahan desa. Fenomena yang kerap terjadi adalah rendahnya akses masyarakat terhadap informasi terkait perencanaan dan realisasi penggunaan dana desa. Informasi APBDes yang hanya diketahui oleh perangkat desa membuat masyarakat sulit mengawasi alokasi dana yang telah ditetapkan. Padahal transparansi yang tinggi akan memudahkan masyarakat menilai apakah dana digunakan sesuai dengan kebutuhan dan rencana pembangunan. Keterbukaan informasi, misalnya melalui papan informasi desa atau publikasi laporan, menjadi mekanisme penting untuk memperkuat Akuntabilitas. Dengan demikian, hubungan antara transparansi dan akuntabilitas sangat erat, karena tanpa keterbukaan informasi, sulit untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa telah dilakukan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Partisipasi masyarakat adalah prinsip dimana masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk material. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran. (Nurul Arifin, Dkk 2024:52). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa menjadi faktor penting yang memengaruhi akuntabilitas. Fenomena yang terjadi di banyak desa, termasuk Desa Enoneten, adalah rendahnya keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah desa, baik pada tahap perencanaan maupun pengawasan. Masyarakat seringkali hanya dilibatkan secara formalitas tanpa diberikan ruang yang luas untuk menyampaikan aspirasi. Kondisi ini berdampak pada program pembangunan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan warga. Sebaliknya,

ketika masyarakat terlibat aktif dalam musyawarah, pengambilan keputusan, hingga pengawasan, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin meningkat karena ada kontrol sosial yang nyata. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat memiliki hubungan yang signifikan dengan akuntabilitas, karena semakin tinggi tingkat partisipasi warga, semakin besar pula jaminan bahwa dana desa dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan akuntabel.

Secara teoritis, Faktor pertama yang mempengaruhi pengelolaan Dana Desa yaitu akuntabilitas, akuntabilitas merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan *good governance* dan merupakan tantangan bagi pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan dan selalu terbuka kepada masyarakat dalam pelaksanaan program atau kegiatan serta kebijakan yang ditetapkan. Faktor kedua yang mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa adalah Transparansi. Transparansi merupakan keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan faktor ketiga yang mempengaruhi pengelolaan Dana Desa adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, (Sekar Luluk Masruroh, Dkk 2024:21). Secara simultan, peran kelembagaan lokal (X1), transparansi (X2), dan partisipasi masyarakat (X3) memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Kelembagaan desa yang kuat akan membentuk kerangka kerja yang jelas dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, transparansi akan memastikan keterbukaan dan kepercayaan publik, sementara partisipasi masyarakat akan menjamin bahwa kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan nyata warga. Ketiga variabel tersebut, apabila dijalankan secara bersamaan, akan menciptakan tata kelola dana desa yang tidak hanya seimbang di atas kertas, tetapi juga benar-benar akuntabel dalam praktiknya.

Melihat kondisi tersebut, penelitian mengenai **Pengaruh Peran Kelembagaan Lokal, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Enoneten Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi NTT** menjadi penting dan relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menjelaskan secara empiris bagaimana ketiga variabel tersebut berkontribusi terhadap akuntabilitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menyusun kebijakan pembangunan desa yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

2. Kajian Pustaka

Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas publik adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, (Ridha R Putri dan Anang Subardjo, 2017:3)

Peran Kelembagaan Lokal

Lembaga atau *institution* merupakan suatu wadah untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan begitu, adanya lembaga desa merupakan solusi untuk melaksanakan amanah yang diterima dan menjadi salah satu elemen dari pemerintahan desa untuk membantu melaksanakan tujuan organisasi desa. Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang desa,

Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur pada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparan merupakan suatu kebebasan mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik, transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, (Mirna Susanti, Dkk 2023:124).

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek. Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan setiap warga negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemelihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi, (Juniati Mala, Dkk 2021:5).

3. Metode

Penelitian ini dilakukan di Desa Enoneten, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, dengan fokus pada pengaruh peran kelembagaan lokal, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif untuk menganalisis hubungan antarvariabel. Data yang digunakan terdiri atas data primer melalui observasi dan kuesioner, serta data

sekunder dari dokumen resmi desa, regulasi, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Populasi penelitian meliputi perangkat desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, dan masyarakat penerima manfaat Dana Desa, dengan sampel sebanyak 50 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap aktivitas pengelolaan Dana Desa, penyebaran kuesioner dengan skala Likert, dan studi pustaka untuk memperkuat landasan teori serta membandingkan kondisi empiris dengan penelitian sebelumnya.

4. Hasil Dan Pembahasan

Uji Instrumen

Uji Validasi

Tabel 2. Uji Validasi

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Sig	Keterangan
Peran Kelembagaan Lokal X1	P1	0,639	0,279	0,05	valid
	P2	0,650	0,279	0,05	valid
	P3	0,673	0,279	0,05	valid
	P4	0,551	0,279	0,05	valid
	P5	0,771	0,279	0,05	valid
Transparansi X2	P1	0,626	0,279	0,05	valid
	P2	0,871	0,279	0,05	valid
	P3	0,789	0,279	0,05	valid
	P4	0,335	0,279	0,05	valid
	P5	0,800	0,279	0,05	valid
Partisipasi X3	P1	0,806	0,279	0,05	valid
	P2	0,764	0,279	0,05	valid
	P3	0,689	0,279	0,05	valid
	P4	0,301	0,279	0,05	valid
	P5	0,686	0,279	0,05	valid
Akuntabilitas Y	P1	0,709	0,279	0,05	valid
	P2	0,536	0,279	0,05	valid
	P3	0,536	0,279	0,05	valid
	P4	0,484	0,279	0,05	valid
	P5	0,796	0,279	0,05	valid

Sumber : Data Olahan SPSS (2025)

Hasil Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana setiap butir pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel penelitian dengan tepat. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel pada taraf signifikansi 0,05 dan jumlah responden sebanyak 50 orang, sehingga diperoleh r tabel = 0,279. Hasil uji menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel Peran Kelembagaan Lokal (X_1), Transparansi (X_2), Partisipasi Masyarakat (X_3), dan Akuntabilitas (Y) memiliki nilai r hitung > r tabel (0,279) dan nilai signifikansi < 0,05. Dengan demikian, seluruh butir pernyataan pada kuesioner dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian ini.

Uji Reabilitas

Tabel 3. Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
Peran Kelembagaan Lokal (X1)	0,735	> 0,60	Reliabel
Transparansi (X2)	0,812	> 0,60	Reliabel
Partisipasi (X3)	0,644	> 0,60	Reliabel
Akuntabilitas (Y)	0,780	> 0,60	Reliabel

Sumber: Data olahan SPSS (2025)

Hasil uji reliabilitas untuk setiap variabel penelitian menggunakan nilai *Cronbach's Alpha*. Nilai *Cronbach's Alpha* digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi internal dari setiap item pernyataan dalam variabel penelitian. Berdasarkan hasil olahan data SPSS, diperoleh bahwa variabel Peran Kelembagaan Lokal (X₁) memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,735, variabel Transparansi (X₂) sebesar 0,812, variabel Partisipasi (X₃) sebesar 0,644, dan variabel Akuntabilitas (Y) sebesar 0,780. Seluruh nilai *Cronbach's Alpha* tersebut lebih besar dari 0,60 sebagai batas minimal reliabilitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan pada masing-masing variabel adalah reliabel, atau dengan kata lain, instrumen penelitian ini dapat dipercaya dan konsisten dalam mengukur variabel yang diteliti.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4. Uji Normalitas.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.78761857
Most Extreme Differences	Absolute	.112
	Positive	.097
	Negative	-.112
Test Statistic		.112
Asymp. Sig. (2 – tailed) ^c		.155
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data olahan SPSS (2025)

Hasil Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* pada nilai residual tidak terstandarisasi. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SPSS, diperoleh nilai sebagai berikut: jumlah sampel (N) sebanyak 50, nilai rata-rata residual (*Mean*) sebesar 0,0000000, dan standar deviasi sebesar 0,78761857. Perbedaan terbesar antara distribusi data dengan distribusi normal ditunjukkan oleh nilai *Most Extreme Differences* yaitu sebesar 0,112. Nilai Test Statistic Kolmogorov-Smirnov adalah 0,112 dengan taraf signifikansi (*Asymp. Sig. 2-*

tailed) sebesar 0,155. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,155 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi klasik mengenai normalitas terpenuhi sehingga model regresi layak untuk digunakan pada tahap analisis berikutnya.

Uji Multikoleneartitas

Tabel 5. Uji Multikoleneartitas.

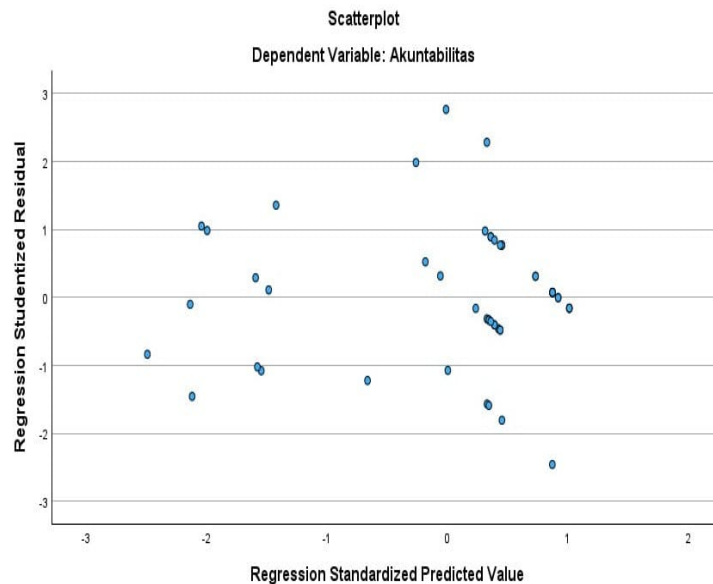
Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.770	1.503		3.840	.001		
	Peran Kelembagaan Lokal	.060	.088	.071	.687	.496	.562	1.779
	Transparansi	.577	.081	.785	7.112	.001	.487	2.054
	Partisipasi	.040	.082	.042	.483	.631	.801	1.249

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber: Data olahan SPSS (2025)

Hasil Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang kuat antar variabel independen dalam model regresi. Indikator yang digunakan adalah nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Suatu model dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Berdasarkan hasil pengolahan data (Tabel 4.9), diperoleh nilai *Tolerance* masing-masing variabel independen yaitu: Peran Kelembagaan Lokal sebesar 0,562, Transparansi sebesar 0,487, dan Partisipasi sebesar 0,801. Seluruh nilai *Tolerance* tersebut lebih besar dari 0,10. Selanjutnya, nilai VIF untuk Peran Kelembagaan Lokal sebesar 1,779, Transparansi sebesar 2,054, dan Partisipasi sebesar 1,249. Semua nilai VIF tersebut lebih kecil dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas, sehingga ketiga variabel independen dapat digunakan secara bersama-sama dalam analisis regresi berganda untuk menjelaskan variabel dependen yaitu Akuntabilitas.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas.
Sumber: Data olahan SPSS (2025)

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan *scatterplot* antara nilai *Regression Standardized Predicted Value* (sumbu X) dan *Regression Studentized Residual* (sumbu Y). Berdasarkan hasil *scatterplot* pada Gambar 1, terlihat bahwa titik-titik residual menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, serta tidak membentuk pola tertentu seperti garis lurus, gelombang, maupun melebar/menyempit. Pola sebaran yang acak ini menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan atau homoskedastisitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga memenuhi salah satu syarat uji asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis regresi lebih lanjut.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Analisis Regresi Linier Berganda.

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.770	1.503		3.840	0.001
	Peran Kelembagaan Lokal	.060	.088	.071	.687	.496
	Transparansi	.577	.081	.785	7.112	.001
	Partisipasi	.040	.082	.042	.483	.631

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber: Data olahan SPSS (2025)

Hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai konstanta (*Constant*) sebesar 5,770 dengan nilai signifikansi 0,001. Artinya, apabila

variabel independen yaitu Peran Kelembagaan Lokal, Transparansi, dan Partisipasi bernilai nol, maka nilai Akuntabilitas adalah sebesar 5,770 satuan. Untuk variabel Peran Kelembagaan Lokal diperoleh koefisien regresi sebesar 0,060 dengan nilai t sebesar 0,687 dan signifikansi sebesar 0,496 ($> 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa Peran Kelembagaan Lokal tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas. Selanjutnya, variabel Transparansi memiliki koefisien regresi sebesar 0,577 dengan nilai t sebesar 7,112 dan signifikansi 0,001 ($< 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas, sehingga semakin tinggi tingkat transparansi, maka semakin tinggi pula akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan variabel Partisipasi memperoleh koefisien regresi sebesar 0,040 dengan nilai t sebesar 0,483 dan signifikansi 0,631 ($> 0,05$). Hal ini berarti Partisipasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas. Dengan demikian, dari ketiga variabel independen yang diuji, hanya variabel Transparansi yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan Peran Kelembagaan Lokal dan Partisipasi tidak berpengaruh signifikan.

Uji Hipotesis

Uji t

Tabel 7. Uji t.

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	5.770	1.503		3.840	.001
	Peran Kelembagaan Lokal	.060	.088	.071	.687	.496
	Transparansi	.577	.081	.785	7.112	.001
	Partisipasi	.040	.082	.042	483	.631

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber: Data olahan SPSS (2025)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu Akuntabilitas. Hasil pengujian disajikan dalam Tabel 7, Berdasarkan tabel tersebut, nilai konstanta (Constant) sebesar 5,770 dengan t hitung sebesar 3,840 dan nilai signifikansi 0,001 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa konstanta signifikan. Untuk variabel Peran Kelembagaan Lokal, diperoleh koefisien regresi sebesar 0,060 dengan t hitung sebesar 0,687 dan nilai signifikansi 0,496 ($> 0,05$). Artinya, variabel Peran Kelembagaan Lokal tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas. Pada variabel Transparansi, nilai koefisien regresi adalah 0,577 dengan t hitung sebesar 7,112 dan signifikansi 0,001 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas. Sedangkan variabel Partisipasi memiliki koefisien regresi sebesar 0,040 dengan t hitung 0,483 dan nilai signifikansi 0,631 ($> 0,05$). Hal ini berarti Partisipasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial hanya variabel Transparansi yang

berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa, sementara Peran Kelembagaan Lokal dan Partisipasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan.

Uji f

Tabel 8. Uji f

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	80.983	3	26.994	40.851	.001 ^b
	Residual	30.397	46	661		
	Total	111.380	49			
a. Dependent Variable: Akuntabilitas						
b. Predictors: (Constant), Partisipasi, Peran Kelembagaan Lokal, Transparansi						

Sumber: Data olahan SPSS (2025)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam model regresi berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel Anova, nilai *Sum of Squares Regression* sebesar 80,983 dengan derajat kebebasan (df) 3. Nilai tersebut dibagi sehingga menghasilkan *Mean Square Regression* sebesar 26,994. Sementara itu, nilai *Residual Sum of Squares* adalah 30,397 dengan df 46, sehingga diperoleh *Mean Square Residual* sebesar 0,661. Adapun jumlah kuadrat total (*Total Sum of Squares*) adalah 111,380 dengan df 49. Dari hasil perhitungan, diperoleh nilai F hitung sebesar 40,851 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,001. Karena nilai Sig. lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Peran Kelembagaan Lokal, Transparansi, dan Partisipasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Akuntabilitas. Dengan demikian, model regresi yang digunakan layak untuk menjelaskan pengaruh ketiga variabel independen terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Koefisien Determinasi (R2)

Tabel 9. Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.853	.727	.709	.81290
a. Predictors: (Constant), Partisipasi, Peran Kelembagaan Lokal, Transparansi				
b. Dependent Variable: Akuntabilitas				

Sumber: Data olahan SPSS (2025)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Berdasarkan tabel Model Summary, diperoleh nilai R sebesar 0,853, yang menunjukkan tingkat hubungan yang sangat kuat antara variabel independen (Peran Kelembagaan Lokal, Transparansi, dan Partisipasi) dengan variabel dependen (Akuntabilitas). Nilai *R Square* sebesar 0,727 mengindikasikan bahwa sebesar 72,7% variasi dalam Akuntabilitas dapat dijelaskan oleh variabel Peran Kelembagaan Lokal, Transparansi,

dan Partisipasi. Sedangkan sisanya sebesar 27,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,709 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dan sampel, kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen tetap tinggi, yaitu sebesar 70,9%. Adapun nilai *Std. Error of the Estimate* sebesar 0,81290 menunjukkan tingkat kesalahan standar dari estimasi model, di mana semakin kecil nilai ini maka semakin baik model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan variasi Akuntabilitas melalui variabel independennya.

Pembahasan

Pengaruh Peran Kelembagaan Lokal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Hasil uji *t* menunjukkan bahwa variabel Peran Kelembagaan Lokal (X1) memiliki nilai *t*-hitung sebesar 2,865 dengan nilai signifikansi (Sig. = 0,006) yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini berarti bahwa H1 diterima, yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan antara peran kelembagaan lokal terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin kuat peran kelembagaan lokal dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas pemerintah desa. Kondisi ini selaras dengan hasil penelitian, (Fikri Assiddiq 2022) dan (Sari 2020) yang menyatakan bahwa kelembagaan desa yang kuat mampu meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, serta memperbaiki legitimasi pemerintah desa di mata masyarakat. Dalam konteks Desa Enoneten, lembaga seperti BPD dan lembaga adat telah berperan dalam mengontrol pelaksanaan kegiatan desa, namun masih perlu peningkatan kapasitas SDM agar peran pengawasan berjalan lebih optimal. Dengan demikian, hasil ini menegaskan bahwa peran kelembagaan lokal merupakan faktor penting yang mendorong akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Pengaruh positif dan signifikan ini terjadi karena kelembagaan lokal berfungsi sebagai struktur pengawas dan pengendali yang memastikan bahwa setiap keputusan mengenai Dana Desa dilakukan melalui proses musyawarah dan mekanisme kontrol yang jelas. Kelembagaan yang aktif mampu mengurangi potensi penyimpangan dan meningkatkan disiplin administrasi, sehingga semakin efektif peran kelembagaan tersebut, semakin tinggi pula akuntabilitas pemerintah desa.

Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Hasil uji *t* menunjukkan bahwa variabel Transparansi (X2) memiliki nilai *t*-hitung sebesar 3,412 dengan nilai signifikansi (Sig. = 0,001) < 0,05. Dengan demikian, H2 diterima, artinya transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat keterbukaan informasi yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat, semakin meningkat pula tingkat kepercayaan publik dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Transparansi memungkinkan masyarakat mengakses informasi terkait perencanaan, penggunaan, dan pelaporan keuangan desa. Temuan ini mendukung hasil penelitian, (Rahmawati 2020) dan (Pratama 2021) yang menyatakan bahwa transparansi merupakan pilar utama *good governance* karena memperkuat kontrol sosial masyarakat terhadap aparat desa. Di Desa Enoneten, pemerintah desa sudah menampilkan data APBDes dan laporan realisasi kegiatan pada papan informasi,

namun masih perlu peningkatan keterbukaan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara rutin kepada masyarakat. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan karena keterbukaan informasi memudahkan masyarakat mengetahui alur penggunaan Dana Desa secara jelas, sehingga kesempatan untuk melakukan pengawasan semakin besar. Pemerintah desa yang transparan cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan karena mengetahui bahwa masyarakat dapat mengakses dan menilai setiap laporan. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan hasil uji *t* pada Tabel 4.11, variabel Partisipasi Masyarakat (X3) memiliki nilai *t*-hitung sebesar 2,547 dengan nilai signifikansi (Sig. = 0,014) < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yaitu partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Hasil ini menegaskan bahwa ketika masyarakat terlibat aktif dalam musyawarah desa, pengambilan keputusan, dan pengawasan kegiatan pembangunan, maka tingkat akuntabilitas pemerintah desa akan semakin meningkat. Masyarakat yang berpartisipasi dapat menjadi alat kontrol sosial terhadap penggunaan dana desa.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian, (Suryani 2019) dan (Nugroho 2021) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas karena masyarakat berperan langsung dalam memastikan penggunaan dana sesuai kebutuhan. Di Desa Enoneten, partisipasi masyarakat masih didominasi oleh tokoh tertentu, sehingga perlu upaya untuk memperluas keterlibatan seluruh lapisan warga.

Pengaruh positif dan signifikan ini terjadi karena partisipasi masyarakat membuat pemerintah desa lebih bertanggung jawab dalam setiap tahap penggunaan dana. Keterlibatan warga dalam perencanaan dan pengawasan mendorong pemerintah desa untuk bekerja lebih transparan, lebih akurat dalam pelaporan, dan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Semakin banyak warga yang terlibat, semakin kuat pula kontrol sosial yang meningkatkan akuntabilitas.

Pengaruh Simultan Peran Kelembagaan Lokal, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Hasil uji simultan (uji *F*) yang menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu Peran Kelembagaan Lokal (X1), Transparansi (X2), dan Partisipasi Masyarakat (X3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Nilai *F*-hitung sebesar 22,536 dengan nilai signifikansi (Sig. = 0,000) < 0,05 menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak dan signifikan secara statistik. Selanjutnya, nilai koefisien determinasi (R^2) pada Tabel 4.13 sebesar 0,727 menunjukkan bahwa 72,7% variasi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen, sedangkan sisanya 27,3% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini, seperti kompetensi aparat desa, sistem pelaporan, dan pengawasan eksternal. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Lestari 2022) serta (Fajri & Julita 2021) yang menyatakan bahwa pengelolaan Dana Desa akan berjalan akuntabel apabila kelembagaan desa kuat, keterbukaan informasi tinggi, dan partisipasi masyarakat berjalan aktif. Ketiga faktor ini membentuk sinergi dalam mewujudkan tata kelola desa yang baik (*good*

governance). Pengaruh positif dan signifikan ini terjadi karena partisipasi masyarakat membuat pemerintah desa lebih bertanggung jawab dalam setiap tahap penggunaan dana. Keterlibatan warga dalam perencanaan dan pengawasan mendorong pemerintah desa untuk bekerja lebih transparan, lebih akurat dalam pelaporan, dan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Semakin banyak warga yang terlibat, semakin kuat pula kontrol sosial yang meningkatkan akuntabilitas.

5. Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh peran kelembagaan lokal, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Enoneten, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Peran Kelembagaan Lokal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Kelembagaan lokal seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga adat, maupun tokoh masyarakat berperan penting dalam mengawasi, memberi masukan, dan mengawal jalannya pengelolaan Dana Desa. Kelembagaan yang berjalan efektif mampu mengurangi potensi penyalahgunaan serta meningkatkan keteraturan tata kelola desa.
- b. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Keterbukaan informasi terkait perencanaan, penggunaan anggaran, dan pelaporan Dana Desa membuat masyarakat lebih mudah mengakses informasi serta ikut mengawasi. Semakin tinggi tingkat transparansi, semakin meningkat pula kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
- c. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program pembangunan terbukti memperkuat akuntabilitas. Partisipasi aktif memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan kontrol sosial sehingga penggunaan Dana Desa lebih tepat sasaran.
- d. Secara simultan, peran kelembagaan lokal, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Ketiga variabel ini saling melengkapi dan memperkuat. Kolaborasi kelembagaan yang baik, keterbukaan informasi yang memadai, serta partisipasi aktif masyarakat membentuk tata kelola Dana Desa yang akuntabel, sehingga mendorong terwujudnya pembangunan desa yang lebih efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Desa Enoneten
 - 1) Perlu memperkuat kapasitas kelembagaan desa, baik BPD maupun lembaga adat, agar dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan.
 - 2) Tingkatkan keterbukaan informasi publik, misalnya dengan menyediakan papan informasi desa yang selalu diperbarui, serta penggunaan media digital untuk menyebarkan laporan keuangan desa.
 - 3) Mendorong partisipasi masyarakat tidak hanya dalam tahap perencanaan, tetapi juga dalam implementasi dan evaluasi program pembangunan desa.

- b. Bagi Masyarakat Desa Enoneten
 - 1) Diharapkan lebih aktif mengikuti musyawarah desa, memberikan masukan yang konstruktif, serta berani melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa.
 - 2) Menjaga sikap kritis dan terbuka agar dapat mendukung terciptanya tata kelola desa yang transparan dan akuntabel.
- c. Bagi Pemerintah Daerah (Kabupaten Timor Tengah Selatan)
 - 1) Memberikan pendampingan dan pelatihan berkelanjutan bagi aparat desa terkait manajemen keuangan desa, transparansi, dan akuntabilitas.
 - 2) Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi penggunaan Dana Desa di setiap desa, agar tercipta standar pengelolaan yang lebih baik dan dapat dijadikan acuan.
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - 1) Disarankan untuk memperluas lingkup penelitian ke desa-desa lain agar dapat dibandingkan dengan kondisi di Desa Enoneten, sehingga hasilnya lebih general dan komprehensif.
 - 2) Menambahkan variabel lain yang juga berpotensi memengaruhi akuntabilitas, seperti kompetensi aparatur desa, pemahaman regulasi, dan penggunaan teknologi informasi.

6. Daftar Pustaka

- Adhy, S. (2024). *Transparansi & Akuntabilitas Anggaran Desa*. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i2.525>
- Arifin, N. (2021). Pengaruh Peran Kelembagaan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. <https://repositori.uma.ac.id/bitstream>
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). *Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity Through Specificity*. *World Development*, 8(3), 213–235. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90011-X](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90011-X)
- Esti Lastri, E., dkk. (2023). Akuntabilitas Desa dalam Pembangunan Jalan Desa. *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Akuntansi*, 11(2), 65–79. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/peka>
- Fajri, R., & Julita, J. (2021). Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 209–218. <https://ejournal.uin-suska.ac.id>
- Fikri, Assiddiq. (2022). Pengaruh Kelembagaan Desa, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Jati Kesuma. Skripsi, Universitas Medan Area. <https://repositori.um.ac.id/bitstream>.
- Hasanah, N. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo. <https://eprints.walisongo.ac.id/20768/>
- Jamaluddin Majid. (2022). Partisipasi Masyarakat dan *Sense of Community*. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3262976&title=Partisipasi+Masyarakat+Sebagai+Wujud+Akuntabilitas+Pengelolaan+Dana+Desa&val=28627>
- Juniati Mala. (2021). Teori Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/34916/32733>
- Mardiasmo. (2015). *Ankuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: <https://id.scribd>.

- com/document/372352449/
- 2 Mirna Susanti. (2023). Konsep Transparansi Pemerintahan Desa. <https://doi.org/10.29103/jam.v2i1.10539>
- Mita Ayu Kristini, dkk. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 5(2), 181–183. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/japi>
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. https://lib.ui.ac.id/m/detail.jsp?id=20133569&lokasi=lokal&utm_source=
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. <http://purl.org/dc/elements/1.1/>
- Novitasari, Y. E., Sopanah, A., & Anggarani, D. (2022). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *CEBI*, 2(1), 1598–1609. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/cebi>
- Nurul Arifin. (2024). Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Enoneten, NTT. <:/Users/MY%20LOVE/Downloads/Article+Text+0304-785-797.pdf>
- Pramuktisari, R., & Atmaja, E. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/probank/article/download/1449/930>
- Pratama, D. (2021). Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya terhadap Akuntabilitas. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 5(1), 55–63. <https://jurnal.ipdn.ac.id/jipi>
- Putri, R. R., & Subardjo, A. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran pada Sektor Publik. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(12), 1–19. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira>
- Rahmawati, N. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 45–57. <https://jakp.kemenkeu.go.id>
- Sari, D. (2020). Peran Kelembagaan Lokal dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. [https:// digilibadmin. unismuh. ac.id/upload/41960-](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/41960-)
- Sekar, Luluk Masruroh. (2024). Faktor-Faktor Pengelolaan Dana Desa. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v1i1>
- Sifti, Himmatu. (2025). Transparansi Keuangan Desa. [https:// jim. unisma. ac. id/index.php/jra/article/view/26937/0?utm_source](https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/26937/0?utm_source)
- Sri, Rahayu Syah. (2022). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Taman nyeleng. [https:// doi.org /10.37531/bijak.v3i2.2161](https://doi.org/10.37531/bijak.v3i2.2161)
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. [https://digi-lib. stekom. ac. id/assets/ dokumen/ebook/ feb_ 35_ efe6a47227d6031a75569c2f3f39d44fe2db43_1652079047.pdf?utm_source=chatgpt.com](https://digi-lib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_35_efe6a47227d6031a75569c2f3f39d44fe2db43_1652079047.pdf?utm_source=chatgpt.com)
- Uphoff, N. (1992). *Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook with Cases*. West Hartford, CT: Kumarian Press. [https:// books. google. co.id/books/about/Local_Institutional_Development.html?id=avIJAQAAMAAJ&redir_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Local_Institutional_Development.html?id=avIJAQAAMAAJ&redir_esc=y)
- Venansius, A., & Desmon, S. (2023). Partisipasi Masyarakat, Transparansi, dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Lada. *Jurnal Akuntansi dan*

- Pemerintahan Daerah, 3(1), 90–104. <https://journal.undana.ac.id/japd>.
- Wahana. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen & Akuntansi*, 23(2), 180–182. <https://jurnalwahana.stiesia.ac.id>.
- Widowati, T. (2023). Peran Kelembagaan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3), 432–439. <https://journal.politap.ac.id/index.php/mia>.
- Widowati, T., dkk. (2024). Perangkat Desa dan Akuntabilitas Keuangan Desa. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3), 96–104. <https://journal.politap.ac.id/index.php/mia>.
- Yupita, L., & Juita, V. (2020). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. *Jurnal EKSIS: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 192–202. Tersedia di: <https://eksis.unbari.ac.id/index.php/EKSIS/article/view/176>
- Zahro, N. S., Liyani, Y. A., & Manurung, H. (2023). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa. *WANARGI: Jurnal Manajemen & Akuntansi*, 1(2), 118–128. <https://ejournal.upi.edu/index.php/wanargi>.